

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018 – 2020**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Akuntansi Syari'ah



Oleh :

Fajar Maulana Fahmi

1605046076

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)760792
Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fajar Maulana Fahmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UTN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Fajar Maulana Fahmi
Nomor Induk : 1605046076
Judul : **Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II

Fajar Aritva, S.Pd. MM
NIP. 19891009 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)760792
Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fajar Maulana Fahmi
Nim : 1605046076
Jurusan : S.1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cimlaude/baik/cukup, pada tanggal : 30 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 30 Juni 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Zaenuri, M.H.
NIP. 19610315 199703 1 001

Drs. H. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Farah Amalia, S.E., M.M.
NIP. 19940118 201903 1 001

Naili Saadah, SE., M.Si., Ak.
NIP. 19880331 201903 2 012

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004

Fajar Aditva, S.Pd., MM
NIP. 19891009 201503 1 003



MOTTO

*“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan
serta memperhalus perasaan.”*

Tan Malaka

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*

QS Ar Rad 11

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan mengucapkan hamdalah ku memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikah rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Tanpa itu semua, mungkin karyaku tidak akan bisa selesai.

Dan juga sholawat salam, tetap saya curahkan kepada beliau Nabi muhammad S.A.W yang saya nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Amiin

Dengan selesainya skripsi ini, saya persembahkan untuk orang-orang paling spesial dalam hidupku :

1. Kedua orang tua, Bapak Mahmud dan Ibu Khuzaenah, Kakak saya Ulfa Ayu Rahmawiti, dan adik saya Ahmad Kasyif Syarof dan Azzahra Hasna, serta nenek saya Maqsudah yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungannya demi keberhasilan penulis.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Seluruh pihak BPS Provinsi Jawa Tengah yang sudah banyak membantu dalam penelitian ini sehingga dapat diselesaikan.

Terimakasih semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Juni 2022
Deklarator

Fajar Maulana Fahmi
1605046076

ABSTRACT

Central Java Province is one of the provinces in Indonesia with a fairly dominant development in the structure of the Regional Budget and Revenue and Expenditure (APBD) from year to year. It is evident that Central Java Province reflects its dependence on balancing funds in the annual budget. This study aims to analyse the effect of balancing funds on capital expenditure on Central Java Province in 2018-2020. The method used in this study is multiple linier regression with an analytical tool in the form of SPSS 26.

The results of this study indicate Revenue Sharing Fund (DBH) has positive significant impact to regional budget. General Allocation Fund (DAU) also had positive significant impact to regional budget. On the other hand, Special Allocation Fund (DAK) had negative impact to regional budget in Central Java Province. The suggestions based on this research are, regional government are expected to optimize the potential of regions in Central Java, to decrease its dependent on transfer funds from the central government, regional government should optimize special activities to maximize special allocation funds (DAK).

Keywords: Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Budget

ABSTRAK

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan dana perimbangan yang cukup dominan dalam struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari anggaran belanja daerah yang mana dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran yang sangat besar, terlihat bahwa Provinsi Jawa Tengah mencerminkan ketergantungan terhadap dana perimbangan dalam anggaran belanja setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan alat analisis berupa SPSS 26.

Hasil dari penelitian ini yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap anggaran belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh signifikan positif terhadap anggaran belanja daerah, akan tetapi Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap anggaran belanja daerah. Saran yang dihasilkan yaitu pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah yang ada di Jawa Tengah sehingga tidak ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat selain itu pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan kegiatan-bidang khusus daerah sehingga penggunaan dana alokasi khusus dapat dimaksimalkan.

Kata kunci: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya, salah satunya nikmat sehat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2020”.

Shalawat dan salam tetap tercurah abadikan kepada Nabi agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju kejelasan yang terang benderang ini dengan iman, islam, dan ikhsan. Semoga nanti di *yaumul qiyamah* kita termasuk kedalam barisan orang-orang yang mendapat syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa sebuah pencapaian tidaklah lepas dari segala bimbingan, dukungan dan bantuannya dari beberapa orang dibelakangnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si. Akt. CA, CPA., selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Semarang Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs, Saekhu, M.H sebagai Dosen Pembimbing I beserta Bapak Fajar Aditya, S.Pd. MM sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, dan tak pernah bosan memberikan arahan-arrahannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Segenap staff beserta karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Keluarga tercinta, Bapak Mahmud, Ibu Khuzaenah, Nenek Maqsudah, serta keluarga besar dan saudara-saudara saya yang tak pernah berhenti berdo'a demi kebaikan saya dan selalu memberikan dukungan dan tak bosan mengingatkan saya.
9. Teman seangkatan dan seperjuangan saya di Akuntansi Syariah angkatan 2016 terkhusus Teman-teman Kelas AKS B yang sudah mewarnai selama masa-masa perkuliahan.
10. Teman-teman KKN Posko 54, Desa Rowosari Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
11. Teman-teman LPM INVETS, PMII RAYON EKONOMI, HMJ AKUNTANSI SYARIAH yang telah menemani saya dalam berorganisasi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini

Penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Demak, 15 November 2021

Penulis

Fajar Maulana Fahmi

NIM. 1605046076

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Berikut ini pedoman transliterasi:

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
س	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’	...‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ó'	Fathah	A	A
ó,	Kasrah	I	I
ó ó	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ... ó'	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... ó'	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ .. اِ .. اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ .. اِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ .. اُو	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbuṭah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta marbuṭah hidup transliterasinya adalah *t*.

Contoh: الأطفالروضة dibaca rauḍatul aṭfāl

2. Ta marbuṭah mati, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: الأطفالروضة dibaca rauḍah al- aṭfāl

3. Ta marbuṭah yang diikuti kata sandang *al*

Contoh: المنورة المدينة dibaca al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا dibaca rabbanā

نزل dibaca nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
Contoh: ءافشال dibaca asy-syifā
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Contoh: القلم dibaca al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون dibaca ta'khuẓūna

النوء dibaca an-nau'

شيء dibaca syai'un

ان dibaca inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: ان اللطهو خير الرازقين dibaca innallāha lahuwa khairarrāziqīn

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.3.3 Tinjauan Pustaka.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Dana Perimbangan	13
2.1.1.1 DAU	15
2.1.1.2 DAK.....	15
2.1.1.3 DBH	16
2.1.2 Belanja Daerah.....	17
2.1.2.1 Belanja Modal Tanah	19
2.1.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	19
2.2 Hipotesis.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	

Jenis dan Metode Penelitian	22
3.1.1 Objek Penelitian.....	23
3.1.2 Populasi dan Sampel.....	24
3.2.1 Populasi	24
3.2.2 Sampel	25
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4 Metode Analisis Data.....	26
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	28
3.4.1.1 Uji Normalitas	28
3.4.1.2 Uji Multikolinieritas.....	28
3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	29
3.4.1.4 Uji Autokorelasi.....	29
3.4.2 Uji t-statistik	30
3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Data Umum.....	32
4.1.1.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	32
4.1.1.2 Subjek Penelitian	33
4.1.2 Data Khusus.....	35
4.1.2.1 Bagi Hasil	36
4.1.2.2 Dana Alokasi Umum.....	36
4.1.2.3 Dana Alokasi Khusus.....	37
4.1.2.4 Belanja Daerah.....	38
4.2 Analisis Data	38
4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	38
4.2.1.1 Uji Normalitas Data	38
4.2.1.2 Uji Multikolinieritas.....	41
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas	42
4.2.1.4 Uji Autokorelasi.....	43

Uji Statistik	44
4.2.2.1 Uji t Parsial	44
4.2.2 4.2.2.2 Uji F (Uji Serempak).....	46
4.2.3 Uji Regresi Berganda	47
4.2.4 Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi	49
4.3 Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran	54
5.3Penutup	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel	24
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif.....	36
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov	39
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	43
Tabel 4.6 Uji t.....	45
Tabel 4.7 Uji F.....	46
Tabel 4.8 Uji Regresi Berganda.....	47
Tabel 4.9 Uji Koefisien Korelasi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Uji Normalitas Menggunakan Normal P-Plot	40
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	42

*Artinya: Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”*¹

Halim (2021) mengatakan, di era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan berbagai sektor terutama sektor publik. Pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan tersebut. Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat.²

Pemberlakuan otonomi daerah ditujukan untuk perkembangan pembangunan daerah, termasuk kemajuan pembangunan ekonomi daerah. Dalam praktiknya pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Adapun seluruh kebijakan pembangunan diserahkan ke pemerintah daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat.

¹ Kemenag RI

² A Halim, Manajemen Keuangan Sektor Publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Salemba Empat 2014 hal 35

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Terdapat dua jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Tujuan utama Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk 2020 sebesar Rp12 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 448 miliar dari 2019 yang mendapatkan alokasi dana transfer sebesar Rp11,76 triliun Dana transfer tahun 2020 terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp436,7 miliar, DAK non fisik Rp 7,1 triliun, dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak Rp520,3 miliar, serta dana insentif daerah Rp 68,4 miliar.³

Total dana transfer ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah tahun 2020 yakni Rp 70,1 triliun. Dengan rincian anggaran untuk 35 kabupaten/kota yakni sebesar Rp 58,12 triliun yang akan dikelola oleh masing-masing daerah, dan Rp 12 triliunnya untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dana transfer ke daerah sebesar Rp 58,12 triliun itu terdiri dari DAU sebesar Rp 35,53 triliun, DAK fisik Rp 3,52 triliun, DAK non fisik Rp7,97 triliun. Selain itu, ada pula dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak Rp1,08 triliun, dana insentif daerah Rp 1,81 triliun dan alokasi dana desa Rp 8,2 triliun Selain beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan dana perimbangan. Alokasi belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, misalnya pada tahun 2015-2017 dengan perkalian satu juta sebesar Rp 18.157, Rp 20.050, dan Rp 23.667. Putri dkk, (2021: 87) Belanja Modal yang merupakan salah satu dari belanja daerah perlu diperhitungkan karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

³ Jatengprov.go.id

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Jika semakin besar investasi modal maka diharapkan sanggup meningkatkan kualitas pada layanan publik. Oleh karena itu, dengan meningkatkan pengalokasian belanja modal atau melalui sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah diharapkan dapat mengubah proporsi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.⁵

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan dan perimbangan yang cukup dominan dalam struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya selisih antara dana dari pemerintah pusat dan PAD. Apabila dilihat dari anggaran belanja modal yang mana

⁴ Dewi, Sri Sulastri. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Daerah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Muhammadiyah Makasar. 2018. hal 6-6

⁵ M Nurzen Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 2016. hal. 7

dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran yang sangat besar, maka seolah Provinsi Jawa Tengah mencerminkan ketergantungan terhadap dana perimbangan dalam anggaran belanja setiap tahunnya. Sementara itu, belanja modal yang rendah dapat mempengaruhi kinerja badan pemerintahan, karena belanja modal sangat penting dalam meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh dana perimbangan Provinsi Jawa Tengah terhadap anggaran belanja dengan judul “**Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Apakah DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Apakah DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah serta menambah wawasan penulis terhadap pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020.
- 2) Bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan menjadi informasi serta bahan pertimbangan bagi manajemen Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terhadap pengaruh dana perimbangan terhadap penggunaan belanja daerah tahun 2018 - 2020.
- 3) Bagi akademik maupun pihak lain, penelitian ini dapat menambah khasanah akademik khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.

Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain maka perlu menggali penelitian-

penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul "Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020" sekaligus sebagai informasi bahan pembandingan persamaan dan perbedaannya.

Pertama Skripsi Andreas marzel pelealu (2013) Pengaruh dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota manado tahun 2003-2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Manado.

Kedua Penelitian Mulia Andirfa dan Dr. Hasan Basri *Jurnal Magister Akuntansi* dengan judul "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh" variabel yang digunakan Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (X) kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan elanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerinth daerah dan dana perimbangan secara parsal berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian variabel pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Ketiga Penelitian Ida Bagus Badjra *Jurnal Akuntansi Indonesia Vol.6 No.1 2017* dengan judul "Kontribusi Pendapatan Asli Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali" variabel yang digunakan Kontribusi Pendapatan Asli Dan Dana Perimbangan (X) Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali (Y). Hasil penelitian Ida menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja modal seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, dana perimbangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, PAD tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah serta dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Provinsi Bali.

Keempat Penelitian Noor Aini Arifah dan Haryanto *Journal Of Accounting Vol.8 No.2 2019* dengan judul "Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Variabel penelitian Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (X) Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Y). Hasil penelitian menunjukkan nilai hitung pada uji-t menghasilkan variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Bagian itu membuat jika semakin tinggi dana perimbangan maka belanja modal akan semakin tinggi pula.

Kelima Penelitian Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, dan Sishadiyati *Jambura Economic Education Journal Volume 3 No 2 2021* dengan judul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal" metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama sama berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi jawa timur tahun 2009 - 2019. Sedangkan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, untuk dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi Jawa Timur, begitu pula

dengan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian terdahulu sudah pernah dilakukan beberapa penelitian pengaruh dana perimbangan terhadap anggaran belanja seperti yang dilakukan Anika dkk dalam jurnal Jambura Economic Education Jurnal dan penelitian yang dilakukan Noor Aini dan Haryanto di Provinsi Jawa Tengah. Namun meskipun ada beberapa kesamaan baik uji hipotesis variabel dan lokasi penelitian namun penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020” memiliki perbedaan, di antaranya variabel dan jenjang tahun objek penelitian.

Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dari keseluruhan penelitian.

Bab II Berisi kajian teori, perumusan hipotesis. Pada bab ini berisi teori-teori yang mendasari pembahasan, yang diambil dari literatur buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, maupun bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Teori tersebut akan menguraikan mengenai sumber-sumber dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bab III Metode Penelitian, bab ini akan diuraikan hal-hal yang dicakup dalam metodologi penelitian yang digunakan, yaitu desain penelitian,

operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan pengujian model analisis penelitian.

Bab IV Analisis dan pembahasan penelitian, pada bab ini akan diuraikan secara lebih mendalam mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis data sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, interpretasi terhadap hasil analisis termasuk pemberian argumentasi berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan.

Bab V Berisi kesimpulan, pada bab ini merupakan penutup dari skripsi. Berisi kesimpulan singkat yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

Kerangka Teori

Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19 apa yang dimaksud dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶

Halim (2014) mengatakan, alokasi Belanja Modal adalah didasarkan pada kebutuhan Masing-masing daerah terkait sarana dan prasarana, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud sehingga memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.⁷

Kebijakan otonomi daerah diatur dalam kewenangan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pengaturan kemandirian daerah dalam UU tersebut memberikan kesepakatan bahwa setiap daerah perlu mengatasi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dalam pelayanan, penyediaan

⁶ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁷ A Halim, Manajemen Keuangan Sektor Publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Salemba Empat 2014 hal 30.

fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah. Selanjutnya dengan adanya pendekatan terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat dapat menyaring dan mengontrol pemanfaatan aset yang bersumber dari APBD.⁸

Sementara Pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows function. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal anatar pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi (Permendagri No.32 Tahun 2008). Sedangkan UU No.33 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 19, menerangkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya pada ketentuan pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).⁹

Adapun masing-masing pengertian dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 DAU

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah setiap tahun sebagai pembangunan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud

⁸ Sari, P dan Ningsih. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAK, dan DAU Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi. 2018 hal. 8

⁹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

dengan DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.1.2 DAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada provinsi Kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yang termasuk yang berasal dari dana reboisasi. DAK antara lain, kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.¹⁰

UU Nomor 33 Tahun 2004 menggariskan bahwa kegiatan khusus yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan di dalam APBN. Fungsi dalam rincian belanja negara terdiri atas beberapa layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Ukamage (2018) menjelaskan Dana Alokasi Khusus (DAK) dipergunakan untuk kegiatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jembatan, infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, prasarana pemerintah daerah, sarana dan prasarana pedesaan, pertanian perdagangan, serta perikanan dan kelautan yang semua itu merupakan komponen dalam

¹⁰ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

belanja modal yang penggunaannya di atur dan ditentukan oleh pemerintah pusat.¹¹

2.1.1.3 DBH

Arbie (2013) DBH adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Deddi (2007) DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun DBH yang bersumber dari APBN berdasarkan angka presentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam desentralisasi dibagi menjadi dua yakni DBH pajak dan DBH bukan pajak sebagai berikut:

1) DBH pajak

Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan, DBH biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, DBH PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21.

2) DBH bukan pajak

DBH sumber daya alam dalam penyalurannya dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan secara triwulan yang dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

¹¹ Ukamaga, D. M. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017). Universitas Jember 2018. hal. 32

Belanja Daerah

Alokasi anggaran belanja modal suatu pemerintahan daerah dibuat untuk menghasilkan asset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri dan atau masyarakat di daerah yang bersangkutan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah ataupun untuk fasilitas publik. Berdasarkan PP no. 24 tahun 2005, bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 menyatakan, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, di mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja modal perlu diperhitungkan karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Penerimaan daerah yang di antaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diperuntukkan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan pelayanan ke masyarakat melalui fasilitas publik yang nantinya dapat meningkatkan belanja modal.¹²

Syaiful dalam Dewi membagi kategori belanja modal menjadi 5 jenis, yaitu:

2.1.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

¹² Putri, Anika Syahida dkk Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Jambura Economic Education Journal. 2001 Volume 3 No 2. Hal 87.

pengadaan/pembelian penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.¹³

2.1.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.2.1 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan dan pengawasan dan pengelolaan keuangan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.¹⁴

2.1.2.2 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan pembangunan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan di maksud dalam kondisi siap dipakai.

2.1.2.3 Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk keperluan pengadaan/penggantian/peningkatan pembangunan atau pembuatan serta

¹³ Dewi Sri Sulastri Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Daerah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Muhammadiyah Makasar. 2018. Hal 26

¹⁴ Dewi Sri Sulastri Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Daerah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Muhammadiyah Makasar. 2018. Hal 33

perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah , peralatan dan mesin, gedung, dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan termasuk dalam belanja modal ini adalah kontrak sewa beli ,pembelian barang-barang kesenian dan lainnya.¹⁵

Juniawan (2018) menjelaskan belanja modal yang merupakan salah satu dari belanja daerah perlu diperhitungkan karena terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Penerimaan daerah yang di antaranya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diperuntukkan pemda untuk sehingga dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat yaitu melalui fasilitas publik yang nantinya dapat meningkatkan Belanja Modal. Belanja modal yang rendah bisa mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan hal yang penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga dalam hal tersebut perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran.¹⁶

Hipotesis

Dugaan sementara atau hipotesis terhadap suatu masalah yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Adapun hipotesis-hipotesis yang hendak diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ha1 = Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2020.
2. Ha2 = Dana Alokasi Umum DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2020

¹⁵ Ibid hal 34

¹⁶ Juniawan, M. A. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E- Jurnal Manajemen Unud. 2018. hal 51

3. Ha3 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Data kuantitatif adalah data jenis yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh dari data skunder. Sekaran (2006) mengatakan, data merupakan unsur penting yang menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Jenis data terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder.¹⁷

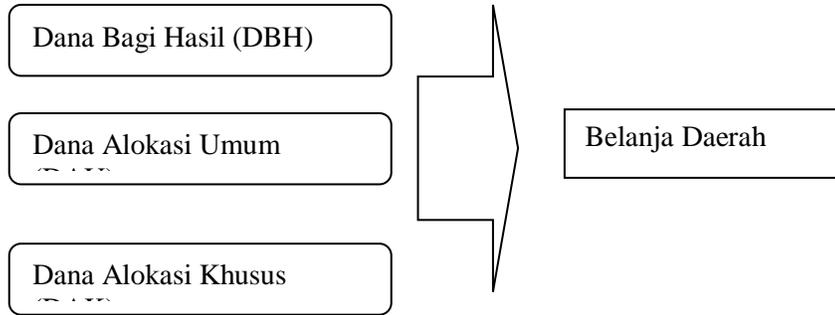
Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data penelitian melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung, dalam penelitian ini data diperoleh dari portal online Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.¹⁸

Objek Penelitian

Adapun variabel yang digunakan yaitu pengaruh anggaran pembangunan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan ukuran rupiah serta variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Sekaran, Uma. *Research Methods for Business*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2006. hal 76

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015 . hal 188



Definisi Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah (Y) adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

b. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dana perimbangan (X) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Singkatan	Indikator	Ukuran
Belanja Daerah	Y1	Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah	Rupiah (Rp)
Dana Bagi Hasil	X1	DBH Kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah	Rupiah (Rp)
Dana Alokasi Umum	X2	DAU Kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah	Rupiah (Rp)
Dana Alokasi Khusus	X3	DAK Kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah	Rupiah (Rp)

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis menetapkan variabel penelitian yaitu

dan perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sugiyono variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data maupun pada saat uji hipotesis.¹⁹

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti guna dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang ditetapkan peneliti sebagai objek ini adalah pengaruh dana perimbangan terhadap anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Penelitian ini ditujukan kepada badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Dengan sampel yang digunakan yakni dana perimbangan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 - 2020.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan, yakni data-data yang didapatkan dari sumber-sumber informasi berupa buku maupun jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, adapun dokumen

¹⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2015. Hal 89

yang digunakan meliputi laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga 2020. Data-data akan diperoleh melalui internet maupun sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Hikmat (2014: 83) menjelaskan, teknik dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang tersedia. Hikmat juga mengutip pendapat Meleong, bahwa dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁰

Bentuk dokumen bisa beragam, menurut Sugiyono²¹ (2015) dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana yang menggunakan 2 variabel dan dengan tujuan memudahkan penelitian dalam menginterpretasikan data yang akan diolah sehingga memudahkan untuk memahami kaitan antara variabel secara parsial ataupun simultan. Sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program data SPSS.

Teknik model analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat yaitu variabel regresi linear, hal ini dapat dilihat pada dana perimbangan (X), terhadap belanja daerah (Y). Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antar variabel bebas dan variabel independen.

²⁰ Hikmat, Mahi M. Metode Penelitian; Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014. hal 123

²¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2015. Hal 240

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b.x$$

Keterangan:

Y = belanja daerah

a = intercept /konstanta

x = dana perimbangan

b = koefisien regresi dari variabel

Penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan model analisis linier untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen maka dilakukan penelitian terhadap hipotesis pada penelitian ini. Untuk menilai apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai, dibutuhkan beberapa pengujian dan analisis diantaranya adalah uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Serta analisis regresi sederhana yang mencakup koefisien Determinasi (R^2)

Nachrowi dan Usman (2006) Analisis regresi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresinya. Pengujian hipotesis berguna untuk memeriksa apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan, yaitu dimana nilai koefisien regresi secara statistik tidak sama dengan nol²².

²² Nachrowi, dan Hardius Usman. Penggunaan Teknik Ekonometri. Jakarta: Rajawali Pers. 2002. hal 126

Uji Asumsi Klasik

Agar mengetahui apakah model regresi estimasi baik atau tidak dan memberikan hasil yang akurat serta efisien dalam pendugaan, pengujian, dan peramalan maka model regresi tersebut perlu terlebih dahulu diuji asumsi klasik sebagai berikut:

3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak, yaitu:

- a) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas (tidak terjadi multikolinieritas). Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Adapun melihat nilai tolerance adalah:

- a) Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji.
- b) Apabila nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi ultikolinieritas terhadap data yang di uji. Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*).

- c) Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji.
- d) Apabila nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji.

3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari heteroskedastisitas ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga satu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada data atau tidaknya korelasi antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data yang diurutkan pada waktu (time series). Model yang baik harus bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi menggunakan model Durbin-Watson. Uji statistik Durbin-Watson menguji bahwa tidak terdapat autokorelasi pada nilai sisa. Kriteria pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- Bila angka $DW < -2$ berarti ada autokorelasi yang positif
- Bila angka DW -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Bila angka $DW > 2$ berarti ada autokorelasi negatif

Uji t-statistik

Uji t-statistik merupakan pengujian koefisien regresi secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (x) berpengaruh terhadap variabel terikat (y). Uji t-statistik ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: \alpha_i = 0 \dots (\text{tidak ada pengaruh})$$

Ha: $\alpha_i \neq 0$... (ada pengaruh)

Hipotesis α_i adalah koefisien variabel independent atau variabel bebas ke-i yang berarti jika sama dengan nol berarti tidak ada pengaruh variabel terhadap variabel atau dengan kata lain diterima. Apabila tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi tertentu nilai t-hitung $>$ t-tabel maka H_0 ditolak. Berarti variabel independent atau variabel bebas yang diuji berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap variabel dependent atau variabel terikat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien R^2 digunakan untuk mengukur seberapa baik regresi sesuai dengan data yang aktualnya. Artinya semakin besar R^2 pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka satu maka semakin baik garis regresi dan sebaliknya jika mendekati angka 0 maka garis regresi kurang baik. Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independent secara simultan terhadap variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data Umum

4.1.1.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Adapun batas- batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan: Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan: Provinsi Jawa Timur
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan: Provinsi Jawa Barat

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar (32,544,12 km²) atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa serta 1,70 persen dari luas Indonesia. Provinsi Jawa Tengah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut Stasiun Klimatologi Kelas 1 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 berkisar antara 180C sampai 280C. Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi dan kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 persen sampai 94 persen.

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdapat 573 kecamatan, 750 kelurahan, dan 8.809 desa dimana ibukota di Kota Semarang. Kabupaten yang memiliki wilayah terluas adalah

Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah sebesar 2.138,51 km², sedangkan kabupaten yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Kudus dengan luas wilayah sebesar 425,17 km², dan kota yang memiliki luas wilayah terluas dan terkecil yaitu Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km² dan Kota Magelang dengan luas wilayah hanya sebesar 18,12 km².

4.1.1.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 kabupaten dan kota. Semua kabupaten dan kota tersebut menjadi subjek dari penelitian ini, yang terdiri dari kabupaten dan kota sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Banjarnegara	19	Kab. Pemasang
2	Kab. Banyumas	20	Kab. Purbalingga
3	Kab. Batang	21	Kab. Purworejo
4	Kab. Blora	22	Kab. Rembang
5	Kab. Boyolali	23	Kab. Semarang
6	Kab. Brebes	24	Kab. Sragen
7	Kab. Cilacap	25	Kab. Sukoharjo
8	Kab. Demak	26	Kab. Tegal
9	Kab. Grobogan	27	Kab. Temanggung
10	Kab. Jepara	28	Kab. Wonogiri
11	Kab. Karanganyar	29	Kab. Wonosobo
12	Kab. Kebumen	30	Kota Magelang
13	Kab. Kendal	31	Kota Pekalongan
14	Kab. Klaten	32	Kota Salatiga
15	Kab. Kudus	33	Kota Semarang
16	Kab. Magelang	34	Kota Surakarta
17	Kab. Pati	35	Kota Tegal
18	Kab. Pekalongan		

Sumber: www.jatengprov.go.id

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berjumlah 101 yang didapatkan dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020. Data tersebut diperoleh dari statistik keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id).

Data Khusus

Terdapat empat data dalam penelitian ini yaitu tentang Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Belanja Daerah (Y). Guna mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

Data khusus tentang Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Belanja Daerah (Y) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2020 selengkapnya disajikan pada lampiran I. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Belanja Daerah (Y) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2020, maka nilai minimum, maksimum, dan mean variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean
Bagi Hasil	101	17.113.151	213.560.102	38.125.228
Dana Alokasi Umum	101	440.041.244	1.461.114.316	985.690.305
Dana Alokasi Khusus	101	0	543.730.018	307.911.527
Belanja Daerah	101	983.838.182	4.776.442.687	2.377.987.498
Valid N (litwise)	101			

4.1.2.1 Bagi Hasil

Dalam laporan realisasi belanja daerah, bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain, sedangkan Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Hasil analisis deskriptif variabel Bagi Hasil di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2020 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 38.125.228, Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 17.113.151 dan 213.560.102. Bagi Hasil terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, sedangkan Bagi Hasil tertinggi ditunjukkan oleh Kabupaten Kudus tahun 2020.

4.1.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian

pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Hasil analisis deskriptif variabel Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2020 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 985.690.305, Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 440.041.244 dan 1.461.114.316. Dana Alokasi Umum terendah ditunjukkan oleh Kota Magelang tahun 2018, sedangkan Dana Alokasi Umum tertinggi ditunjukkan oleh Kabupaten Banyumas tahun 2020.

4.1.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Hasil analisis deskriptif variabel Dana Alokasi Khusus di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2020 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 307.911.527, Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 0 dan 543.730.018. Dana Alokasi Khusus terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Kudus tahun 2020, sedangkan Dana Alokasi Khusus tertinggi ditunjukkan oleh Kabupaten Banyumas tahun 2020.

4.1.2.4 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

Hasil analisis deskriptif variabel Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2020 memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2.377.987.498, Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 983.838.182 dan 4.776.442.687. Belanja Daerah terendah ditunjukkan oleh Kota Pekalongan tahun 2018, sedangkan Belanja Daerah tertinggi ditunjukkan oleh Kota Semarang tahun 2019.

Analisis Data

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

4.2.1.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

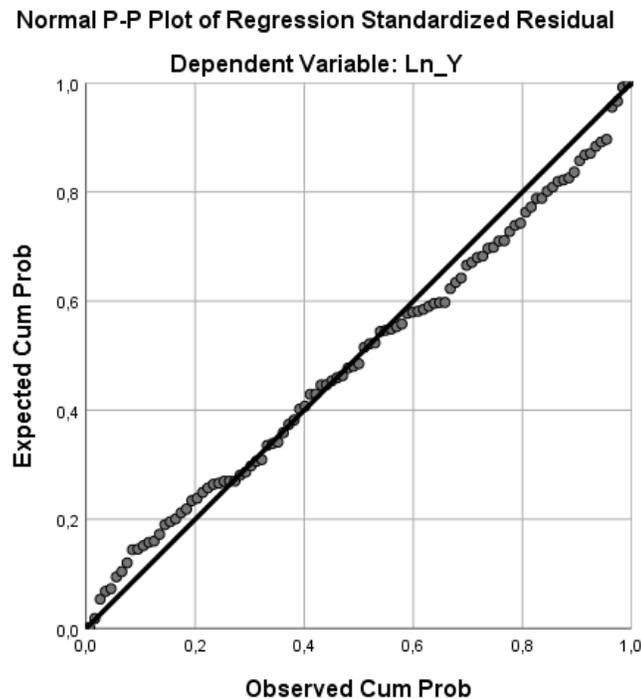
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	0,0660721
Most Extreme Differences	Absolute	0,064
	Positive	0,064
	Negative	-0,061
Test Statistic		0,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber data: data sekunder yang diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.3 Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dari pengelolaan SPSS hasil di dapat berdasarkan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, adalah 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

Gambar 4.1 Uji Normalitas Menggunakan Normal P-Plot



diagonal dan mengikuti arah garis diagonal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

4.2.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada model regresi ada ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Jika nilai VIF lebih

besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	0,984	1,016
	X2	0,113	8,85
	X3	0,114	8,802

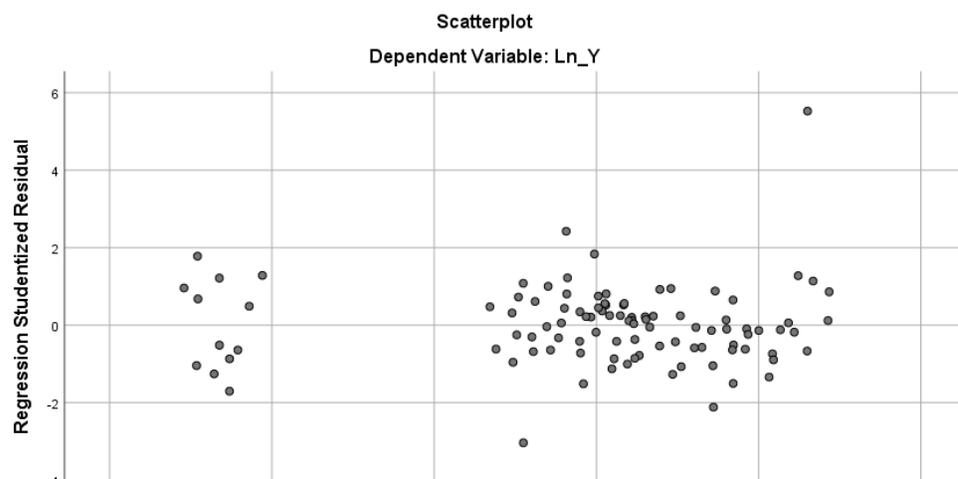
Sumber data: data sekunder yang diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa variabel-variabel diatas memiliki nilai tolerance lebih dari 0.10 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 26

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah berdasarkan variabel yang mempengaruhinya.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga satu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada data atau tidaknya korelasi antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data yang diurutkan pada waktu (time series). Model yang baik harus bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi menggunakan model Durbin-Watson. Uji statistik Durbin-Watson menguji bahwa tidak terdapat autokorelasi pada nilai sisa. Kriteria pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- Bila angka $DW < -2$ berarti ada autokorelasi yang positif
- Bila angka DW -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Bila angka $DW > 2$ berarti ada autokorelasi negatif

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	0,92	370,083	3	97	0	1,854
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						
b. Dependent Variable: Y						

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.3 di dapatkan nilai Durbin Watson (DW hitung) sebesar 1,854. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara DU (3;101) 1.7374 dan 2,2626 (4-dU). Sehingga kesimpulannya adalah Uji Autokorelasi terpenuhi.

Uji Statistik

4.2.2.1 Uji t Parsial

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk mengetahui pola hubungan antar variabel, maka akan diuji tiga hipotesis yang telah diajukan sebelumnya menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Uji t sendiri dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan adalah signifikan atau tidak maka perlu membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Dimana jika t hitung > t tabel maka hipotesa dapat diterima, dan sebaliknya jika t hitung < t tabel, maka hipotesis tidak diterima.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan regresi $\check{Y} = \alpha + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$ Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam sebagai berikut.

- H1: Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah

- H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.
- H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tabel 4.6 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-218281013	84305517		-2,589	0,011
X1	2,541	0,772	0,096	3,293	0,001
X2	2,926	0,225	1,112	12,982	0
X3	-1,228	0,582	-0,18	-2,111	0,037
Dependent Variable: Y					

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 26

1. Nilai r hitung pada variabel Bagi Hasil (X1) adalah sebesar 3,293 dengan tingkat signifikan 0,001 karena $3,293 > 1.69$ dan $0,001 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Kesenjimpulannya variabel bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
2. Nilai r hitung pada variabel Dana alokasi umum (X2) adalah sebesar 12,982 dengan tingkat signifikan 0 karena $12,982 > 1.69$ dan $0 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Kesenjimpulannya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
3. Nilai r hitung pada variabel Dana Alokasi Khusus (X3) adalah sebesar -2,111 dengan tingkat signifikan 0,037 karena $-2,111 < 1.69$ dan $0,037 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Kesenjimpulannya variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

4.2.2.2 Uji F (Uji Serempak)

Uji statistik “F” atau uji signifikansi simultan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Jika nilai F hitung $>$ F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Sedangkan Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka hipotesis ditolak. Maka artinya Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y).

Tabel 4.7 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41104332145 440940000,0 00	3	13701444048 480313000,0 00	370,0 83	,000 ^b
	Residual	35911923062 84899300,00 0	97	37022601095 720608,000		
	Total	44695524451 725840000,0 00	100			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 26

Berdasarkan hasil uji ANNOVA atau F test pada tabel 4.6 didapatkan F hitung sebesar 370,083 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena F hitung $>$ f tabel (370,083 $>$ 3,29) dan tingkat signifikan 0,000 $<$ 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi belanja daerah (Y) atau dapat dikatakan bahwa variabel Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y).

Hal ini tercermin pula dari tingkat signifikan pada table diatas, dimana tingkat signifikan pada table diatas, dimana tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan atau bersama-sama, maka akan berpengaruh pada Belanja Daerah. Jika Bagi Hasil, DAU dan DAK naik secara bersama-sama maka Belanja Daerah juga akan naik.

Uji Regresi Berganda

Tabel 4.8 Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-218281013	84305517		-2,589	0,011		
X1	2,541	0,772	0,096	3,293	0,001	0,984	1,016
X2	2,926	0,225	1,112	12,982	0	0,113	8,85
X3	-1,228	0,582	-0,18	-2,111	0,037	0,114	8,802

Dependent Variable: Y

Sumber data: data sekunder yang diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda dapat di sajikan sebagai berikut:

$$Y = -218281013,347 + 2,541 (X1) + 2,926 (X2) - 1,228 (X3)$$

- a. Nilai konstanta sebesar -218281013,347 menunjukkan bahwa jika variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sama dengan nol maka besarnya

nilai belanja modal adalah -218281013,347 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

- b. Koefisien dana bagi hasil (X_1) sebesar 2,541 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel dana bagi hasil sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 2,541 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.
- c. Koefisien dana alokasi umum (X_2) sebesar 2.926. Hal ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan variabel dana alokasi umum sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 2.926 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.
- d. Koefisien dana alokasi khusus (X_3) sebesar -1,228. Hal ini menunjukkan apabila terjadi penurunan variabel dana alokasi khusus sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 1,228 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi

Uji koefisien korelasi (R) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Sedangkan uji koefisien determinasi (R^2) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan adjusted R square sebagai koefisien determinasi. Jika nilai adjusted R square sama dengan 0, maka variasi

variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya adjusted R square sama dengan 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Tabel 4.9 Uji Koefisien

Korelasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,959 ^a	0,920	0,917	192412580
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber data : data sekunder yang diolah, SPSS 26

Pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono, (2015) yaitu:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Berdasarkan Tabel 4,4 tampilan output SPSS nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,959 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Belanja Daerah(Y).

Berdasarkan Tabel 4.4 nilai adjusted R square adalah 0,920 yang menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana

Alokasi Khusus (X3) mampu menjelaskan perubahan sebesar 92% atas variabel Belanja Daerah (Y), sedangkan 8% (100%-92%) dijelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Bagi hasil, Dana Alokasi dan Dana Alokasi Khusus pada anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Pembahasan hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut;

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Dimana pada hasil penelitian dihasilkan Koefisien dana bagi hasil (X1) sebesar 2,541 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel dana bagi hasil sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 2,541. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus dan Dwinandra (2015) dimana dana bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal Provinsi Bali. Selain itu hasil penelitian oleh Sri Mulyati dan Yusriadi (2018) juga menghasilkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Siti Murohah (2019) dalam penelitiannya juga menghasilkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Jawa Tengah pada periode 2015 - 2017.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Dimana pada hasil penelitian dihasilkan Koefisien dana alokasi umum (X2) sebesar 2,926 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel dana bagi hasil sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 2,926. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus dan Dwinandra (2015) dimana dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif

terhadap belanja modal Provinsi Bali. Selain itu hasil penelitian oleh Sri Mulyati dan Yusriadi (2018) juga menghasilkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Siti Murohah (2019) dalam penelitiannya juga menghasilkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Jawa Tengah pada periode 2015 - 2017.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Dimana pada hasil penelitian dihasilkan koefisien dana alokasi khusus (X3) sebesar - 1,228 menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan variabel dana bagi hasil sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 1,228. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Murohah (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal di Jawa Tengah pada periode 2015 - 2017. Irfan Ferdiansyah et al (2018) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kalimantan Timur.

BAB V

KESEIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikembangkan dalam bab 1V yang dapat diambil kesimpulan adalah:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Dimana pada hasil penelitian dihasilkan Koefisien dana bagi hasil (X1) sebesar 2,541 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel dana bagi hasil sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 2,541. Hal ini menunjukkan semakin tinggi dana bagi hasil akan berdampak pada meningkatnya hasil belanja daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Dimana pada hasil penelitian dihasilkan Koefisien dana alokasi umum (X2) sebesar 2,926 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel dana bagi hasil sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 2,926. Hal ini menunjukkan semakin tinggi dana alokasi umum akan berdampak pada meningkatnya hasil belanja daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap belanja daerah. Dimana pada hasil penelitian dihasilkan koefisien dana alokasi khusus (X3) sebesar - 1,228 menunjukkan bahwa apabila terjadi penurunan variabel dana bagi hasil sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,228. Hal ini menunjukkan bahwa

penurunan pada dana alokasi khusus akan berdampak pada meningkatnya hasil belanja daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan daerah, diantaranya:

- 1) Pada periode 2018-2020, dana bagi hasil dan dana alokasi umum memberikan pengaruh signifikan yang positif terhadap belanja daerah di Jawa Tengah dimana dalam hal ini berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap besarnya transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat, maka dari itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah yang ada di Jawa Tengah sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat.
- 2) Pada periode 2018-2020, dana alokasi khusus memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal di Jawa Tengah dimana hal ini berarti pemerintah daerah kurang mengoptimalkan kegiatan/bidang khusus yang dapat dibiayai, maka dari itu pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan kegiatan-bidang khusus daerah sehingga penggunaan dana alokasi khusus dapat dimaksimalkan.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, agar memperluas cakupan penelitiannya dengan menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi belanja modal daerah. Hal ini dimaksudkan agar variasi naik turunnya belanja daerah dapat lebih dijelaskan.

Penutup

Segala puji bagi Allah sebagai Dzat yang maha segalanya, sesungguhnya hanya

kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perilaku. Shalawat serta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi akhiru zaman Rosulullah Muhammad SAW.

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sungguh kecongkakan intelektual bilamana penulis menganggap skripsi yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat *khilaf* (salah).

Oleh karenanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat *Hidayah* dan *Maghfirah* dari Allah *Rabbul Izzaty*.
Amin Ya Robbal 'Alamin.

Daftar Pustaka

Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.

Nurzen, M. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.

Putri, Anika Syahida dkk (2001) *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. Jambura Economic Education Journal Volume 3 No 2.

Sari, P dan Ningsih (2018). *Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAK, dan DAU Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian; Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nachrowi, dan Hardius Usman. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta: Rajawali Pers.

Juniawan, M. A. (2018). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud,

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, Departemen dalam negeri, Jakarta.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dewi, Sri Sulastri (2018) *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Daerah di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Muhammadiyah Makasar

Ukamaga, D. M. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017)*. Universitas Jember

Ida Bagus Dwi Putra & Dwinandra (2015). *Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana*

Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 13.3

Irfan Ferdiansyah et al (2018) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Inovasi Vol 14 (1)*

Sri Mulyati & Yusriadi (2017) *Pengaruh Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Visioner & Strategis Vol 6 (2)*

Siti Murohah (2019) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah*

LAMPIRAN

Lampiran 1

		Tahun	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja
1	Kabupaten Cilacap	2018	72,313,259	1,362,443,518	458,836,867	3,270,826,229
		2019	61,674,610	1,423,200,397	443,795,857	3,584,962,084
		2020	66,506,132	1,295,279,562	388,796,477	3,219,631,963
2	Kabupaten Banyumas	2018	42,908,155	1,373,971,809	477,533,051	3,654,366,009
		2019	28,656,208	1,437,036,239	474,659,909	3,725,271,325
		2020	42,143,126	1,461,114,316	543,730,018	3,773,568,764
3	Kabupaten Purbalingga	2018	25,434,252	881,574,483	333,565,497	2,062,928,259
		2019	20,781,607	918,228,685	332,709,914	2,201,807,611
		2020	25,572,950	934,782,107	314,644,145	2,104,113,319
4	Kabupaten Banjarnegara	2018	30,048,651	959,486,489	364,545,235	2,246,953,106
		2019	22,981,870	999,003,344	323,297,060	2,222,941,415
		2020	29,408,261	1,015,129,697	351,732,368	2,259,878,404
5	Kabupaten Kebumen	2018	29,627,426	1,234,003,169	390,504,709	2,865,408,324
		2019	22,159,109	1,279,681,428	386,546,619	3,021,687,363
		2020	30,513,954	1,322,910,412	394,979,830	3,044,056,768
6	Kabupaten Purworejo	2018	31,642,090	924,251,795	308,339,590	2,255,674,841
		2019	19,577,301	963,312,191	309,541,855	2,282,729,436
		2020	26,245,641	1,011,560,710	334,917,366	2,483,287,920
7	Kabupaten Wonosobo	2018	34,626,573	827,791,657	277,386,976	2,123,005,390
		2019	29,449,520	877,474,203	329,638,507	2,214,052,791

		2020	33,596,113	889,213,906	332,341,859	2,070,280,635
8	Kabupaten Magelang	2018	36,431,592	1,060,540,612	301,160,638	2,734,632,543
		2019	28,247,886	1,097,366,974	327,189,199	2,797,624,801
		2020	36,028,834	1,109,430,605	374,065,573	2,719,200,678
9	Kabupaten Boyolali	2018	42,900,294	1,014,602,020	381,026,306	2,392,095,005
		2019	37,591,656	1,045,669,923	353,373,735	2,513,981,310
		2020	41,057,303	1,064,047,626	390,893,754	2,480,627,139
10	Kabupaten Klaten	2018	48,233,590	1,237,967,327	375,930,038	3,001,117,685
		2019	32,229,984	1,282,250,122	351,593,529	3,084,765,735
		2020	39,379,096	1,297,168,894	371,188,377	2,907,327,298
11	Kabupaten Sukoharjo	2018	26,507,198	906,416,629	286,887,272	2,522,799,190
		2019	17,113,151	946,104,486	278,544,600	2,143,687,570
		2020	32,285,325	953,962,609	301,252,234	2,401,529,962
12	Kabupaten Wonogiri	2018	27,810,006	1,124,733,467	379,596,212	2,495,839,702
		2019	22,110,456	1,181,037,066	391,309,608	2,685,943,446
		2020	28,278,654	1,192,822,108	393,267,688	2,477,910,262
13	Kabupaten Karanganyar	2018	38,881,728	978,664,650	308,185,920	2,301,066,989
		2019	29,554,922	1,018,544,740	310,662,896	2,469,462,923
		2020	35,417,454	1,027,021,995	336,120,790	2,346,436,745
14	Kabupaten Sragen	2018	27,428,744	1,049,016,918	329,063,101	2,536,004,330
		2019	21,040,339	1,083,308,681	385,117,566	2,578,755,182
		2020	27,906,860	1,105,770,343	364,392,237	2,422,886,893
15	Kabupaten Grobogan	2018	40,960,700	1,094,460,434	385,401,362	2,575,624,568

		2019	34,446,513	1,144,560,870	384,806,560	2,746,493,905
		2020	42,574,259	1,215,026,908	404,948,897	2,680,645,523
16	Kabupaten Blora	2018	115,863,714	926,682,649	333,004,046	2,184,262,784
		2019	119,847,294	966,573,992	355,308,380	2,322,382,566
		2020	91,960,413	883,338,891	275,708,795	2,012,812,302
17	Kabupaten Rembang	2018	41,011,688	771,584,367	258,619,192	1,912,072,520
		2019	38,779,148	799,760,392	213,425,406	1,975,181,553
		2020	43,942,090	810,570,557	264,133,374	2,054,302,198
18	Kabupaten Pati	2018	33,452,113	1,189,796,870	414,061,985	3,034,364,266
		2019	24,894,732	1,240,426,636	372,139,522	3,091,474,682
		2020	33,257,963	1,254,698,193	396,378,522	2,910,220,672
19	Kabupaten Kudus	2018	235,660,117	807,056,991	239,054,267	2,135,380,847
		2019	209,525,165	851,036,584	237,498,255	2,260,081,505
		2020	213,560,102	849,410,428	-	1,911,471,464
20	Kabupaten Jepara	2018	39,836,896	984,914,974	314,882,423	2,422,830,633
		2019	33,697,485	1,039,864,085	319,593,179	2,528,382,702
		2020	46,243,233	948,599,557	275,060,169	2,399,062,011
21	Kabupaten Demak	2018	35,461,544	894,376,873	275,348,404	2,267,871,580
		2019	32,291,545	946,467,336	295,358,455	2,562,354,775
		2020	37,080,664	960,411,394	311,983,783	2,400,405,766
22	Kabupaten Semarang	2018	40,449,487	952,362,147	314,696,839	2,357,905,961
		2019	32,240,120	1,001,565,375	317,284,973	2,492,255,493
		2020	38,783,479	1,010,270,390	345,470,193	2,457,006,194

23	Kabupaten Temanggung	2018	50,075,868	793,485,677	225,548,811	1,818,460,590
		2019	45,213,757	828,948,502	259,084,004	1,969,512,901
		2020	52,009,961	854,160,529	279,373,355	1,996,489,275
24	Kabupaten Kendal	2018	47,528,990	956,331,079	295,942,730	2,373,391,424
		2019	41,076,867	998,236,127	309,059,354	2,440,873,249
		2020	44,255,800	1,006,102,383	330,733,395	2,451,834,514
25	Kabupaten Batang	2018	36,199,222	781,383,387	231,124,510	1,799,480,130
		2019	31,712,053	817,365,659	241,894,552	1,919,265,838
		2020	40,829,780	835,669,833	266,214,951	1,925,617,426
26	Kabupaten Pekalongan	2018	26,222,396	915,154,037	346,840,785	2,331,601,405
		2019	21,533,683	974,248,885	326,171,879	2,353,391,384
		2020	26,704,775	979,933,360	340,114,098	2,446,656,142
27	Kabupaten Pemalang	2018	30,316,211	1,180,834,332	331,768,131	2,658,866,791
		2019	24,594,206	1,223,060,205	350,820,964	2,948,441,837
		2020	23,112,248	1,241,959,529	361,546,020	2,836,842,885
28	Kabupaten Tegal	2018	29,421,275	1,144,494,182	339,287,873	2,644,342,782
		2019	22,161,572	1,198,561,641	365,945,635	2,815,712,481
		2020	30,166,591	1,219,309,940	403,544,936	2,905,805,253
29	Kabupaten Brebek	2018	32,660,115	1,321,798,057	398,599,759	3,019,061,801
		2019	29,095,102	1,373,396,371	473,606,165	3,308,888,412
		2020	32,172,349	1,381,401,958	470,962,097	3,293,494,179
30	Kota Magelang	2018	24,423,094	440,041,244	105,991,303	1,092,817,321
		2019	19,159,018	455,177,029	99,763,232	1,102,207,518

		2020	23,861,159	460,404,050	79,271,912	1,006,107,354
31	Kota Surakarta	2018	47,513,325	826,587,795	216,821,174	2,105,363,418
		2019	32,359,859	879,123,635	198,845,553	2,134,614,681
		2020	52,426,543	799,696,465	175,453,855	1,624,395,242
32	Kota Salatiga	2018	24,417,998	448,067,710	88,527,220	1,181,793,047
		2019	18,865,461	469,967,335	80,522,090	1,186,330,070
		2020	22,893,650	475,828,296	87,149,688	1,006,404,906
33	Kota Semarang	2018	168,784,360	1,190,422,387	330,030,705	4,687,029,027
		2019	114,095,355	1,317,186,595	307,161,094	4,776,442,687
		2020	141,348,249	1,299,131,994	374,826,015	5,319,832,790
34	Kota Pekalongan	2018	26,693,032	449,055,738	110,631,025	983,838,182
		2019	19,027,230	475,842,089	115,463,502	1,063,652,853
		2020	25,183,473	480,230,431	126,976,389	1,060,107,482
35	Kota Tegal	2018	25,571,473	482,150,715	94,845,071	1,093,617,362
		2019	18,911,296	502,969,026	119,802,446	1,202,471,927
		2020	25,246,220	512,935,790	153,175,243	1,298,031,100

Lampiran 2

Output SPSS

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	2381439082,6931	668547114,65779	101
X1	38085278,5347	25140357,90171	101
X2	985706405,9604	253996170,18276	101

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2		
1	,959 ^a	,920	,917	192412580,39879	,920	370,083	3	97	,000	1,854

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

X3	310262995,0198	98162949,48813	101
----	----------------	----------------	-----

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1,000	,199	,952	,873
	X1	,199	1,000	,105	,075
	X2	,952	,105	1,000	,941
	X3	,873	,075	,941	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,023	,000	,000
	X1	,023	.	,148	,228
	X2	,000	,148	.	,000
	X3	,000	,228	,000	.
N	Y	101	101	101	101
	X1	101	101	101	101
	X2	101	101	101	101
	X3	101	101	101	101

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41104332145440940000,000	3	13701444048480313000,000	370,083	,000 ^b
	Residual	3591192306284899300,000	97	37022601095720608,000		
	Total	44695524451725840000,000	100			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-218281013,347	84305517,285		-2,589	,011					
X1	2,541	,772	,096	3,293	,001	,199	,317	,095	,984	1,016
X2	2,926	,225	1,112	12,982	,000	,952	,797	,374	,113	8,850
X3	-1,228	,582	-,180	-2,111	,037	,873	-,210	-,061	,114	8,802

a. Dependent Variable: Y

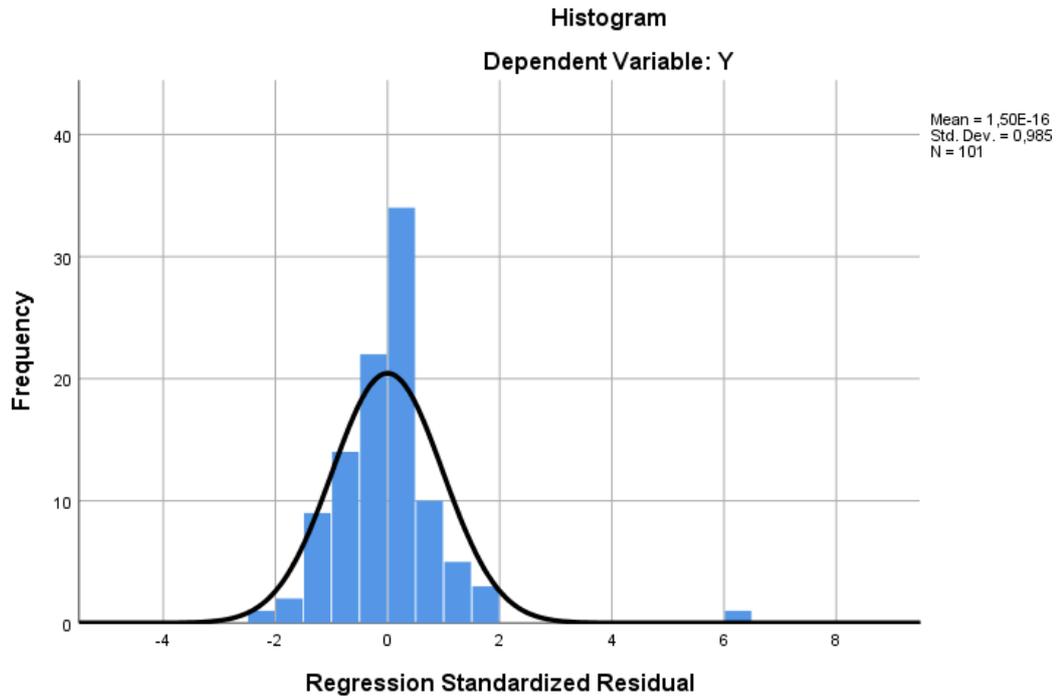
Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3,698	1,000	,00	,02	,00	,00
	2	,249	3,854	,01	,92	,00	,00
	3	,049	8,695	,72	,06	,01	,05
	4	,004	29,736	,27	,01	,99	,94

a. Dependent Variable: Y

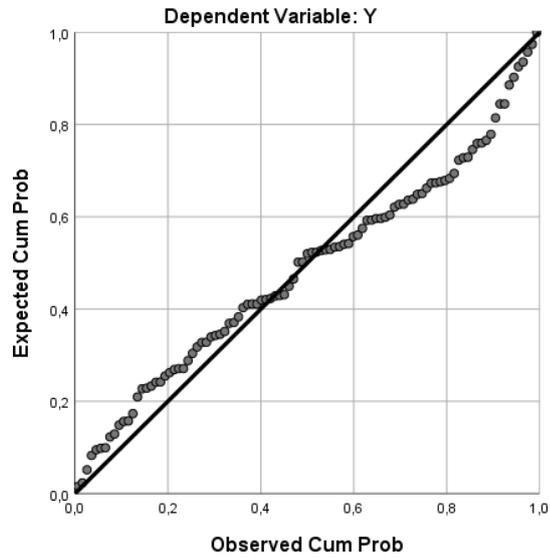
Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1001070336,0000	3557404160,0000	2381439082,6931	641126603,29642	101
Std. Predicted Value	-2,153	1,834	,000	1,000	101
Standard Error of Predicted Value	19167708,000	134845760,000	34780468,397	16097398,924	101
Adjusted Predicted Value	995476352,0000	3555936512,0000	2381049328,2981	636876185,00690	101
Residual	-414785952,00000	1228262016,00000	,00000	189504414,36243	101
Std. Residual	-2,156	6,383	,000	,985	101
Stud. Residual	-2,222	7,303	,001	1,065	101
Deleted Residual	-495741696,00000	1607649280,00000	389754,39500	223986733,24252	101

Stud. Deleted Residual	-2,269	10,829	,036	1,334	101
Mahal. Distance	,002	48,124	2,970	5,499	101
Cook's Distance	,000	4,119	,055	,416	101
Centered Leverage Value	,000	,481	,030	,055	101

a. Dependent Variable: Y

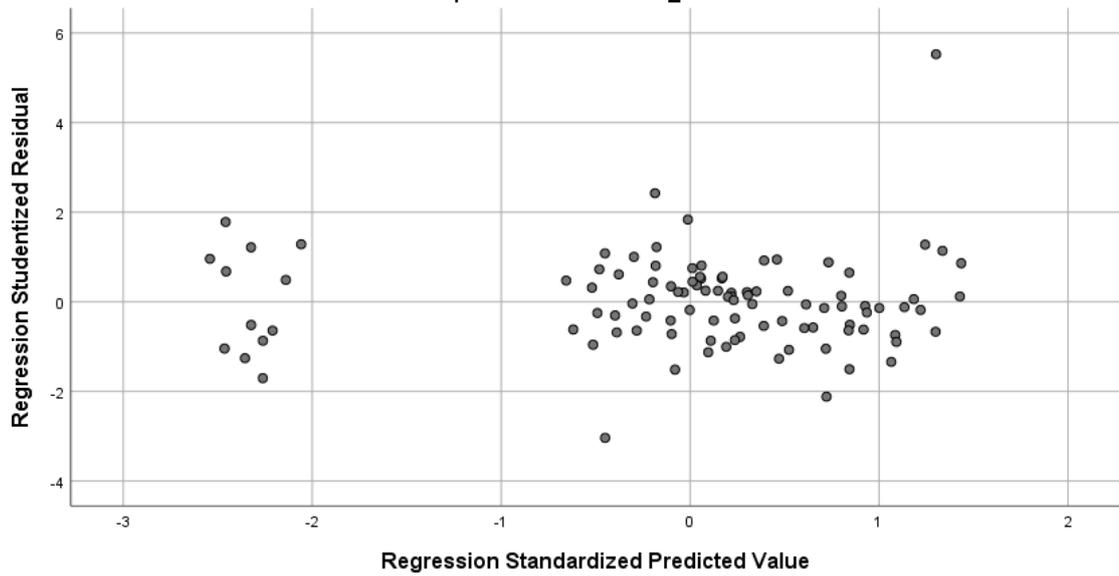


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: Ln_Y



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N	101
---	-----

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,06607209
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,061
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fajar Maulana Fahmi
NIM : 1605064076
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat. Tanggal Lahir : Demak, 03 Desember 1997
Agama : Islam
Alamat : Betahwalang, Bonong, Demak
Email : fajarmaulanafahmie@gmail.com

Pendidikan Formal :

MI Miftahul falah

MTs Miftahul falah

MAN Demak

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Semarang, 24 Juni 2022

Fajar Maulana Fahmi

NIM. 1605046076

